



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023  
KE PROVINSI BALI**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2023**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023**  
**KE PROVINSI BALI**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Bali adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 April 2023.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Mei 2023.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Bali adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 - 2023 ke Provinsi Bali adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Bali;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang tugas Komisi IV DPR RI di Provinsi Bali; serta

3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

#### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Bali dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

#### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 17-21 Juli 2023 dan bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Kantor BULOG Wilayah Provinsi Bali, Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Bali Exotic Marine Park. Jl. Bali Eksotik No.8, Pedungan, Denpasar Selatan, Loka Penelitian Perikanan Tuna di Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, dihadiri oleh:

1. Wakil Gubernur Provinsi Bali;
2. Walikota Denpasar;
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian;
6. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan Perikanan, KKP;
8. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP;
9. Direktur Jenderal KSDAE, KLHK;
10. Direksi Perum BULOG;
11. Direktur Utama PT *ID FOOD*;
12. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero);
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali; dan
15. Dinas Pertanian Provinsi Bali.

#### **F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

1. Kantor Gubernur Provinsi Bali;
2. Kantor BULOG Wilayah Kerja Provinsi Bali;
3. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar - Provinsi Bali;
4. Bali Exotic Marine Park. Jl. Bali Eksotik No.8, Pedungan, Denpasar Selatan; dan
5. Loka Penelitian Perikanan Tuna di Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

## **II. GAMBARAN UMUM**

Provinsi Bali terletak di antara 8°3'38"–8°50'56" Lintang Selatan dan 114°25'53"–115°42'39" Bujur Timur. Luas Provinsi Bali sekitar 5.636,66 km<sup>2</sup> (Terdapat perubahan luas wilayah yaitu 563.666 Ha (berdasarkan data BPS dan Biro Pem) dan menjadi 559.468 ha, ada perbedaan (pengurangan) sebesar 4.198 Ha atas hasil perhitungan peta dasar yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial

(BIG), membentang sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Bali dikelilingi perairan yang menjadi batas wilayah Provinsi, yaitu:

- Sebelah Utara: Laut Bali
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Barat: Selat Bali
- Sebelah Timur: Selat Lombok

Bali adalah pulau yang sangat indah dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Keberadaan gunung berapi memberikan kesuburan tanah untuk usaha pertanian. Gunung berapi di Pulau Bali adalah Gunung Batur dan Gunung Agung. Titik tertinggi di Bali adalah Gunung Agung setinggi 3.148 m dan terakhir meletus pada tahun 1963. Sedangkan Gunung Batur letusannya pernah menghasilkan bencana besar di bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu.

Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu. Di hampir setiap sudut wilayah terdapat pura peribadatan, baik pura besar yang dipakai sebagai tempat upacara bersama maupun pura kecil di setiap rumah. Oleh karena itu, selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga disebut dengan Pulau Seribu Pura. Ritual keagamaan yang kental memengaruhi hampir setiap unsur dan gerak kehidupan masyarakat Bali. Hal ini menjadikan Bali tidak hanya memiliki pemandangan yang indah tetapi juga kebudayaan yang unik, eksotis, dan terjaga. Bali adalah tujuan wisata internasional yang seringkali lebih dikenal daripada Indonesia.

Masyarakat Bali menganut falsafah hidup Tri Hita Karana yang memuat tiga unsur pembangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Tri Hita Karana menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata. Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian hingga saat ini. Beberapa kegiatan ekonomi dan kawasan baru telah dan sedang dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata, seperti ekonomi kreatif, pariwisata maritim, dan ekowisata di Ubud, Nusa Dua, Seminyak, Jimbaran, dan beberapa tempat lainnya.

### **III. HASIL KUNJUNGAN**

#### **A. KUNJUNGAN KE KANTOR GUBENUR BALI**

Kunjungan ke kantor Gubernur Bali merupakan salah satu agenda utama Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Ke Provinsi Bali. Pada Kunjungan Kerja tersebut Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPOR RI ke Provinsi Bali Sudin, S.E. sekaligus juga sebagai Ketua Komisi IV DPR RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa, kunjungan ke Provinsi Bali selalu memiliki daya tarik yang besar bagi anggota Komisi IV DPR RI; Bali sejak lama terkenal dengan keindahan alam dan keelokan budayanya yang terkenal ke manca negara, dalam beberapa waktu yang lalu juga Bali telah sukses sebagai tuan rumah perhelatan besar pertemuan negara-negara dikawasan Asia Pasifik dalam bentuk pertemuan Puncak G20.

Pada kunjungan Kerja Reses kali ini terdapat beberapa hal yang ingin di gali dari Provinsi Bali terkait dengan pembangunan bidang pertanian, perikanan

dan kelautan serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan sektor penting dalam menunjang perekonomian Bali terutama dalam sektor pariwisatanya paska COVID-19 yang telah membuat kegiatan sektor pariwisata Bali sempat mengalami keterpurukan.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang di bacakan Oleh Wakil Gubernur Bali menjelaskan bahwa Perekonomian Bali pada tahun 2023 memiliki perkiraan tumbuh pada kisaran 4,50 persen sampai dengan 5,30 persen (yoy), berpotensi meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 4,84 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh perbaikan kunjungan wisatawan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata secara bertahap. Peningkatan kunjungan wisatawan juga didukung oleh penyelenggaraan MICE Event berskala nasional maupun internasional sehingga turut mendorong meningkatnya kunjungan wisman ke Bali. Dapat dikimpulkan Ekonomi Bali akan tumbuh lebih tinggi terutama seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dampak dari seluruh peristiwa serta kebijakan yang terjadi di dunia.

Tercatat Perekonomian Bali didominasi oleh Sektor Pariwisata (56,78%), Sektor Pertanian (9,24%), Sektor Kelautan/Perikanan (4,21%), Sektor Industri (14,63%), dan Sektor lain (15,14%). Sehingga perekonomian di Bali sangat tergantung dan rentan oleh faktor eksternal.

Sebagai prioritas utama pemulihan dan pembangunan perekonomian, Provinsi Bali harus bisa meningkatkan produktivitas berbasis kearifan lokal di sektor-sektor unggulan Bali untuk mewujudkan kehidupan karma Bali yang Sejahtera dan Bahagia, sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* untuk mewujudkan Bali Era Baru, khususnya di sektor pertanian dalam arti luas, sektor sumber daya kelautan dan perikanan, sektor Industri Kecil Menengah/UMKM *branding* Bali, dalam akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, serta dapat mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok Provinsi lain di Indonesia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat Bali.

Pada saat ini kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Bali hanya tinggal 9 persen saja, sehingga pada saat terjadi pandemi COVID-19, perekonomian Bali mengalami kontraksi sampai dengan minus 8 persen karena lumpuhnya sektor pariwisata sebagai andalan ekonominya. Dengan pengalaman seperti itu maka Bali akan berupaya meningkatkan peran sektor pertaniannya minimal sebesar 10 persen.

Wakil Gubernur Bali Juga menjelaskan Bahwa saat ini, luas kawaasan hutan di daerahnya baru mencapai 24 persen dari minimal yang seharusnya yaitu sebesar 30 persen dari luas wilayahnya. Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan luas tutupan hutannya; kendala utama dari upaya ini tingginya kebutuhan lahan untuk pengembangan pariwisata di daerahnya. Meskipun demikian kedepan terus diupaya berbagai perbaikan regulasi dan pengawasan dalam penggunaan lahan di wilayahnya agar Bali tetap memiliki ekosistem alam yang baik bagi lingkungan, kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya.

Dari segi ketahaan pangan menurut Wakil Gubernur Bali daerahnya masih memiliki surplus padi dari daerahnya sebesar sekitar 100 ribu ton pertahunnya, meskipun demikian karean tidak tersedianya penggilkingan padi

yang memadai di Bali, maka seringkali gabah yang dihasilkan di Bali di bawa ke luar Bali untuk di proses menjadi beras. Kebijakan Bali yang mengembangkan Bali sebagai Provinsi organik dengan Bali Go Green-nya menjadi salah satu upaya untuk membuat Bali memiliki ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan pertanian organik maka daerahnya bukan hanya akan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup secara berkelanjutan, akan tetapi menyediakan bahan pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi sesuai dengan trend permintaan pangan saat ini.

Permasalahan yang agak krusial dalam pengelolaan pangan di Bali, khususnya beras, yaitu belum tersedianya unit penggilingan padi yang memadai untuk mengolah padi yang dihasilkan di wilayahnya. Pembelian padi oleh pemerintah melalui Perum BULOG sulit dilakukan karena harga gabahnya lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah. Oleh sebab itu untuk memenuhi pemenuhan cadangan beras pemerintah di Provinsi Bali, maka pengadaan gabah/berasnya diambil dari Nusa Tenggara Barat, atau dari Jawa Timur.

Saat ini masih terdapat 1300 hektar kawasan hutan rakyat yang memiliki masalah dengan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaannya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan, oleh sebab pemerintah Provinsi Bali sangat berharap bantuan DPR RI untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu pada beberapa wilayah konservasi terdapat beberapa permohonan masyarakat untuk mendapatkan hak pemanfaatannya.

Hal yang lain yang menjadi masalah adalah perhatian dan perlakuan terhadap hewan yang dipinjamkan untuk keperluan tertentu yang sekarang kondisinya sudah tua. Diperlukan penanganan yang memadai agar kesejahteraan hewan tersebut dapat tetap terjamin dan terjaga. Diperlukan juga dukungan aturan dan kebijakan agar tidak semua hewan bisa masuk ke Bali, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem setempat.

Merespon terhadap Permasalahan yang terjadi di Bali terkait dengan masalah Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perikanan, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI memberikan saran dan Rekomendasi sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Bali yang hanya 9 persen agar dipertimbangkan untuk di tingkatkan, mengingat pengalaman dari terjadinya Pandemi COVID-19 yang baru lalu yang menyebabkan perekonomian paling sangat terpuruk, selain itu sektor pertanian yang kuat akan menghasilkan ketahanan pangan yang kuat dalam menopang pengembangan sektor pariwisata yang menjadi andalan perekonomian di daerah tersebut.
2. Surplus produksi padi yang dimiliki oleh Provinsi Bali hendaknya bukan hanya sekedar mendukung pengembangan pariwisata Bali akan tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan petaninya. Upaya peningkatan nilai tambah perlu dilakukan dengan membangun unit-unit hasil pengolahan pertanian (penggilingan padi),
3. Karantina Pertanian agar membantu untuk mendorong dan memfasilitasi pemasaran produk pangan dan hortikultura yang dihasilkan oleh Bali, melalui peningkatan dan perluasan kegiatan ekspornya,

4. Perum BULOG direkomendasikan untuk membangun unit penggilingan padi di Provinsi Bali agar gabah yang dihasilkan tidak diolah di luar Bali, sehingga nilai tambahnya tidak diperoleh Provinsi Bali. Oleh sebab itu Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah Bali untuk membuat perda Larangan mengeluarkan produksi padinya ke luar Bali.
5. Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman produktif yang di tanam pada Kawasan hutan rakyat, komisi IV merekomendasikan agar pemerintah pusat membuat nurseri tanaman produktif (buah-buahan) di Provinsi Bali yang dapat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
6. Pemerintah Pusat agar membantu dalam meningkatkan luas tutupan hutan di Bali dan membantu menyelesaikan 1300 hektar Tahura yang di kelola tidak sesuai dengan aturannya baik oleh rakyat maupun perusahaan dan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggarnya.
7. Pemerintah agar mengatur dengan ketat terkait dengan pemasukan hewan ke Bali, sehingga pemasukan hewan tersebut tidak mengganggu keseimbangan ekosistem di Bali. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar dilakukan pencatatan terhadap hewan-hewan tersebut.
8. Pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan hewan yang dipinjamkan sehingga tidak terlantar. Komisi IV Merekomendasikan agar ada regulasi setingkat undang undang yang mengatur tentang kesejahteraan hewan yang berada di luar ekosistem/habitatnya.
9. Komisi IV merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperhatikan dengan seksama dan sungguh sungguh terkait dengan penggunaan lahan untuk kegiatan non pertanian dan kehutanan sehubungan dengan telah terjadinya devisa air di Provinsi tersebut.
10. Sehubungan dengan kebijakannya Provinsi Bali untuk menjadi Provinsi Organik dengan program Go Green-nya, maka disarankan agar kegiatan tersebut dilakukan dengan berhati-hati terutama terkait dengan ketersediaan produksi pangan. Dalam masa transisi pupuk *an organik* masih diperlukan dan dikurangi secara bertahap.
11. Dalam penanganan sampah, Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat, dengan lebih banyak membangun unit-unit pengolahan sampah akhir dengan pengawasan yang lebih ketat.
12. Komisi IV DPR RI mempertanyakan terkait dengan AMDAL restoran yang berada di danau Batur.
13. Untuk menambah jumlah pasokan air yang mengalami devisa, Komisi IV DPR RI mendorong kepada pemerintah daerah agar mengusulkan pembangunan embung embung (*water resevoir*) di daerah-daerah yang mengalami devisa air.
14. Komisi IV DPR RI merekomendasikan bahwa Kawasan ekowisata jangan diambil dan dikelola oleh oknum mantan pejabat, Pengelolaan Ekowisata direkomendasikan untuk di kelola oleh BUMD.

## **B. KUNJUNGAN KE KANTOR PERUM BULOG WILAYAH BALI**

Pada kunjungan ke Kantor Perum BULOG Wilayah Bali di peroleh keterangan sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) BULOG wilayah Bali tidak dapat memenuhinya dari hasil panen di Bali meskipun terdapat surplus gabah sekitar 100 ribu ton dalam setahunnya. Tidak bisanya dilakukan pengadaan gabah dari Bali, karena Harga Gabah lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp 5.000 per Kg/GKG. Dan sampai sat ini BULOG Baru menyerap sebanyak 1600ton GKG. Dengan Kondisi tersebut maka untuk pengadaan CBP, maka pembelian gabah di lakukan di Provinsi NTB dan Jawa Timur.
2. Total Pengadaan beras/gabah Dalam negeri sebesar: 723.207 Ton, terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak: 576.636 Ton dan pengadaan beras Komersial : 146.571 Ton.
3. Rincian terhadap kuota importasi tahun 2023 sebanyak 2 juta Ton, yaitu: Tahap I terkontrak 500.000 Ton dengan realisasi 502.797,70 Ton. Tahap II terkontrak 300.000 Tondengan realisasi 117.477 Ton. Tahap III sedang tahap lelang di Bulan Juli sebesar 300.000 Ton. Tahap IV sisa 900.000 Ton akan dilelang di Bulan Agustus.
4. Ketersediaan stok beras di BULOG terdiri atas pengadaan dalam negeri: 216.099 Ton, pengadaa LN: 428.583 Ton, pengadaan Komersial: 60.806 Ton.

Menanggapi penjelasan dari Perum BULOG tentang situasi pangan nasional, Tim Kunker Komisi IV DPR RI merekomendasikan hal hal sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Perum BULOG dapat membangun unit penggilingan padi di Provinsi Bali untuk menanggulangi keluar masuknya Gabah yang dihasilkan di Provinsi tersebut di proses/di gilig di Provinsi lainnya, sehingga menyebabkan peningkatan harga dan nilai tambah yang tidak diperoleh petani di Provinsi Bali.
2. Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Perum BULOG untuk dapat menjamin stabilitas ketersediaan pangan pokok di Bali seperti beras, jagung, kedele, minyak goreng dan gula, mengingat terus meningkatnya kegiatan pariwisata di Bali.

## **C. KUNJUNGAN KE KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELASI DENPASAR**

Pada kunjungan ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisis IV DPR RI diterima oleh Kepala Badan Katantina Pertanian. Dalam sambutannya kepala badan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan penyelenggaraan karantian adalah untuk mencegah masuknya Ham Penyakit Hewan Karantina/Organime Pengganggu Tanaman Karantina ke area lain, mencegah HPHK/OPTK ke luar negeri, pengawasan dan penegndalian keamanan dan mutu pangan/pakan, Sumber Daya Genetik,



Produk Rekayasa Genetik, Agensia Hayati, tumbuhan dan satwa liar/langka.

2. Berdasarkan Permentan nomor 3238 tahun 2009 terdapat 121 hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) yang harus di wapai, yaitu Foot and Mouth Disease (Penyakit Mulut dan Kuku), Vesicular Stomatitis (VS), Swine Vesicular Disease, Peste des Petits Ruminants, Contagious Bovine Pleuro Pneumonia (CBPP), Hendra Virus, Lumpy Skin Disease, Rift Valley Fever, Blue Tongue Sheep Pox dan Goat Pox, Africans Horse Sickness, Africans Swine Fever, Hog Cholera, Avian Influenza (AI), New Castle Disease (NCD), Brucellosis, dan lain lain.
3. OPTK sebanyak 833, antara lain *Fusarium oxysporum f.sp elaeidis*, *Dickeya chrysanthemi*, *Cicadulina bipunctata*, *Bactrocera occipitalis*, *Tilletia spp.*, Strawberry latent ringspot nepovirus (SLRSV), *Dickeya dadantii*, *Pseudomonas syringae pv. Maculicola*, *Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus*, *Radhopolus similis*, *Ditylenchus dipsaci*, *Rhodococcus fascians*, *Pectobacterium atrosepticum*, *Pseudomonas syringae pv. Lachrymans*.  
Tindak lanjut Kepmentan No. 761/2022 tentang Tim Patriot Ekspor Produk Pertanian.
4. Sebagai Tindak Lanjut Kepmentan Nomor 761/2022 tentang Tim Patriot Ekspor Produk Pertanian, Badan Kafrantina Pertanian berperan dalam melakukan akselerasi ekspor komoditas pertanian sebesar 300 persen.
5. Lima Langkah strategis Barantan dalam akselerasi ekspor adalah a) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemda dan stakeholder terkait, b) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian, c) mendorong pertumbuhan ekspor baru melalui penumbuhan agropreneur, d) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja sama bilateral/multilateral dan e) peningkatan layanan dan kemudahan ekspor.
6. Langkah mitigasi resiko terhadap penyakit hewan yaitu : mecegah masuk dan tersebarnya penyakit ASF, PMK, Rabies, dan LSD. Langkah mitigasi resiko yang dilakukan antara lain: pengawasan intensif, koordinasi dengan instansi terkait, penerapan SOP, penguatan biosekuriti, penguatan laboratorium dalam menguji ASF dan PMK dan melakukan sosialisasi.

Dalam menanggapi penjelasan tersebut Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RFI meminta kepada Barantan untuk membantu memfasilitasi dan mendorong peningkatan ekspor komoditi pertanian yang dihasilkan di Bali seperti salak dan manggis dengan cara memberikan pendampingan kepada para petani/pelaku ekspor.
2. Agar meningkatkan penjagaan pada daerah daerah pemasukan, karena disinyalir banyaknya pintu-pintu pemasukan yang tidak terjaga dengan baik terutama pada pintu-pintu pemasukan yang berbatasan antar 2 negara.
3. Komisi IV DPR RI mempertanyakan tentang pengwasan pada impor gandum dan impor tepung telur yang jumlahnya terus meningkat dan belum

diawasi oleh Karantina Pertanian sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi impor ekspor komoditi pertanian.

4. Komisi IV DPR RI memepertanyakan tentang penyakit PMK; kementerian Pertanian sampai saat ini belum memberikan keterangan tentang dari mana masuknya PMK tersebut.
5. Komisi IV DPR RI mempertanyakan terkait dengan pengawasan impor daging kerbau dari negara yang tidak bebas PMK. Bagaimana kontrol yang dilakukan agar daging yang didatangkan dipastikan berasal dari pemeriksaan daging kerbau yang berasal dari negara yg tidak bebas PMK, bagaimana penjaminannya bahwa daging kerbau yang diimpor tersebut berasal dari zona yang bebas PMK.

#### **D. KUNJUNGAN KE BALI EXOTIC MARINE PARK**

Kunjungan Tim Kunker Komisi IV DPR RI Ke Bali Exotic Marine Park di damping oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutan dan diterima oleh Direktur Bali Exotic Marine Park. Pada Kesempatan tersebut dijelaskan hal hal sebagai berikut oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu:

1. Lembaga konservasi mempunyai fungsi utama sebagai tempat pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain itu juga mempunyai fungsi sebagai tempat Pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
2. Lembaga Konservasi dikelompokkan menjadi Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus dan Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum; Bentuk lembaga konservasi untuk kepentingan umum di Indonesia terdiri dari kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum zoologi, kebun botani, taman tumbuhan khusus, dan herbarium
3. Bali Exotic Marine Park (BEMP) adalah sebuah Lembaga Konservasi yang berbentuk Taman Satwa yang berlokasi di kota Denpasar berdasarkan surat keputusan Menteri LHK Nomor SK. 505/Menlhk/SEtjen/KSA.28/8/2019, berfungsi sebagai tempat konservasi, kesejahteraan satwa lumba-lumba, risert dan sekaligus tempat edukasi
4. BEMP rutin bekerja sama denga Universitas, Yayasan, dan komunitas dalam hal risert dan pengembangan IPTEK di *bidang marine life*. sembilan Lumba-lumba (*T. aduncus*) dewasa kini hidup bahagia dan tenang di kolam habitat BEMP. Empat ekor merupakan koleksi yang didapat melalui hibah dari Direktur Jenderal KSDAE, 5 ekor merupakan titipan dari Balai KSDA Bali.  
Terhitung 13 Dolphin, paus dan cetacea telah direscue oleh tim BEMP sepanjang Jan 2021 hingga Jun 2023  
Terhitung 40 penyu dewasa & juvenile telah dilepas oleh tim relawan BEMP dan mitra sepanjang Januari 2021 - Juni 2023

Dalam kesempatan tersebut Komisi IV DPR RI menyampaikan Hal hal sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI sedang melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam revisi undang-undang tersebut, DPR RI tetap mempertahankan 3 (tiga) pilar konservasi, yaitu Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan. Komisi IV DPR RI mengharapkan agar kegiatan konservasi di Indonesia semakin kuat dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang lain pasca revisi UU 5/1990.
2. Komisi IV DPR RI ingin melihat dari dekat proses pengelolaan lembaga konservasi sebagai bagian kegiatan konservasi Ex Situ yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana daya dukung fasilitas, kegiatan sehari-hari serta fasilitas pendukung lain seperti fasilitas kesehatan, fasilitas laboratorium dan sumber daya manusia pengelola lembaga konservasi. Sebagai salah satu satwa yang dilindungi lumba-lumba juga di anggap sebagai salah satu hewan tercerdas, mampu memecahkan masalah dan melakukan interaksi sosial. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut lumba-lumba banyak ditangkap di alam untuk tujuan pertunjukan yang berakibat pada berkurang nya populasi lumba-lumba di alam.
3. Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang pengelolaan lembaga konservasi oleh swasta dan peluang pembangunan lembaga-lembaga konservasi baru di daerah-daerah lain, selain Provinsi Bali.

## **E. KUNJUNGAN KE LOKA PENELITIAN PERIKANAN TUNA - PEDUNGAN**

Kunjungan Tim Kunker Komisi IV DPR RI Reses ke Loka Penelitian Tuna di damping oleh Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada diskusi tersebut dihasilkan sebagai berikut:

1. Sambutan dan ucapan selamat dari Bapak Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Si. selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. BRSDMKP telah bertransformasi menjadi BPPSDMKP. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa riset yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dialihkan ke BRIN. Hal ini yang dialami oleh Satuan Kerja Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT). Terdahulu LRPT melakukan kegiatan riset isu-isu perikanan tuna dan setelah dikeluarkannya Perpres 78 Tahun 2021 tersebut seluruh riset beralih dan dilantik menjadi BRIN. Untuk kedepannya LRPT sesuai dengan Perpres 38 Tahun 2023 akan difungsikan sebagai Balai Diklat Aparatur Sipil Negara Wilayah Tengah. KKP telah menyusun 5 program prioritas memiliki peran strategis. Untuk mendukung program tersebut maka BPPSDMKP melaksanakan 2 program terobosan. Adapun salah satu programnya adalah revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan.

2. Sambutan dari Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT): Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. Menyampaikan untuk tahun 2023 kapal pelaku usaha sebanyak 501 akan mulai bertahap dialihkan dari lokasi pelabuhan Benoa ke pelabuhan Pengambangan. Rencana tahun 2024 proses pelaksanaan pembangunan pelabuhan Pengambangan diperluas sampai tahun 2026. Selanjutnya Bali dapat memproduksi tuna sebanyak 2.000 ton. Hal ini menjadikan Bali mendapatkan peringkat 1 dari aspek produksinya, sementara untuk peringkat 2 terdapat di DKI Jakarta, selebihnya ada di NTT, Sumatera Utara, NTB. Sedangkan untuk jumlah kapal aktif di Bali memiliki 1.066 kapal, hal tersebut menjadikan Bali menduduki peringkat tertinggi setelah DKI Jakarta. Selanjutnya menyampaikan terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pungutan PNBP yang dalam proses revisi.
3. Diskusi dan Tanya jawab yang dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap: Bapak Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si.
  - a. Putu Sumardiana, MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Perlunya dukungan mesin tempel untuk nelayan dan meminta penggunaan BBM nelayan dirubah menjadi gas (dikonversi), serta masalah subsidi BBM yang belum jelas dibawah 30 GT.
  - b. Nyoman Sudarta selaku Sekretaris Jendral Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI). Menyampaikan kondisi umum di Benoa saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan terdapat 2 asosiasi yaitu ATLI dan ASPERPADU (Asosiasi ini hanya ada 1 perusahaan). Permasalahan yang pertama terkait efisiensi dan perlunya transshipment untuk menjaga kualitas produksi ikan.
  - c. Riki selaku Direktur PT Bandar Nelayan menyampaikan terkait transshipment membutuhkan lebih efisien untuk sistem dan membawa hasil perikanan kedepannya.
  - d. Ani selaku Direktur PT Golden Tuna menyampaikan sebagian besar pemilik kapal memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) sehingga membutuhkan bahan baku ikan agar hasil tangkapan dapat diolah sendiri untuk kebutuhan nasional dan luar negeri.
  - e. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. menanggapi pertanyaan bahwa dukungan mesin kapal nanti akan dikomunikasikan dengan Provinsi. Kementerian kelautan dan Perikanan sedang membahas Permen hasil turunan PP terkait Perikanan terukur yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di lapangan, khususnya terkait PNBP pra-produksi dan paska-produksi untuk pelaku usaha/nelayan.
  - f. Sudin S.E. menyampaikn mohon untuk dievaluasi kebijakan lama yang dianggap tidak tepat, dan mohon diperbaiki terkait PNBP agar menjadi kebijakan yang benar.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- A. Komisi IV DPR RI mendukung penuh usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta Lembaga Konservasi dalam hal ini Taman Benoa Eksotik (Bali Exotic Marine Park) dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawetan

lumba-lumba di Bali. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan, evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha lembaga-lembaga konservasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan satwa (*animal welfare*) di seluruh wilayah Indonesia.

- B.** Komisi IV DPR RI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan memasukkan hukuman yang tegas kepada orang per orang khususnya lembaga konservasi yang menelantarkan atau tidak memperhatikan kesejahteraan satwa liar yang sudah tua.
- C.** Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas di pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas pertanian.
- D.** Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengawasi importasi komoditas gandum dan tepung telur yang jumlahnya terus meningkat.
- E.** Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog untuk membangun pabrik penggilingan padi di Pulau Bali guna mengatasi terjadinya penggilingan padi di luar pulau Bali yang menyebabkan penambahan biaya dan tidak diperolehnya nilai tambah.
- F.** Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat perda tentang pelarangan pengeluaran gabah dari Bali ke Luar Daerah Bali.
- G.** Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kebijakan aturan pungutan PNBP bagi pelaku usaha penangkapan ikan, khususnya pra produksi dan paska produksi agar tidak membebankan pelaku usaha namun dapat memberikan devisa negara secara adil dan bijaksana.
- H.** Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu nelayan Bali yang membutuhkan mesin kapal dan bantuan lainnya yang dibutuhkan nelayan, serta dapat berkoordinasi dengan Pertamina untuk membantu nelayan mendapatkan bantuan elpiji sebagai bahan bakar (BBM) pengganti solar ke laut.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Bali. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 24 Juli 2023

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

## LAMPIRAN DOKUMENTASI











## LAMPIRAN LIPUTAN MEDIA

### 1. Bidang Pertanian

- a. <https://www.nusaBali.com/berita/146400/wagub-cok-ace-terima-kunker-komisi-iv-dpr-ri>
- b. <https://www.mediapelangi.com/2023/07/17/wagub-Bali-menerima-kunjungan-kerja-reses-komisi-iv-dpr-ri/>

### 2. Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45645/t/Saadiah+Uluputy+Soroti+Kebijakan+Penangkapan+Ikan+Terukur+yang+Beratkan+Nelayan>
- b. [https://www.facebook.com/DitjenPerikananTangkap/posts/httpwwwdjptkkpgoidreadpenerbitan-spb-dan-logbook-di-pelabuhan-perikanan-nusantar/929311960544214/?locale=id\\_ID](https://www.facebook.com/DitjenPerikananTangkap/posts/httpwwwdjptkkpgoidreadpenerbitan-spb-dan-logbook-di-pelabuhan-perikanan-nusantar/929311960544214/?locale=id_ID)

### 3. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. <https://www.lintasparlemen.com/i-made-urip-sebut-ada-potensi-kerusakan-lingkungan-gegara-tutupan-hutan-di-Bali-masih-24-persen/>
- b. <https://www.kabaralam.com/konservasi/5939524531/revisi-uu-ksdae-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-Bali-exotic-marine-park-intip-upaya-konservasi-lumba-lumba>
- c. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45596/t/Komisi%20IV%20Dukung%20Pengawetan%20Satwa%20Dilindungi%20di%20Lembaga%20Konservasi%20Guna%20Hindari%20Kepunahan>
- d. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7275/kunker-ke-Bali-komisi-iv-dpr-dukung-upaya-konservasi-satwa-liar-dilindungi>